

PENGARUH KELUARGA BERENCANA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA BARAT

L. Fathurrahman

Dosen Universitas 45 Mataram

E-mail: laluatung@gmail.com

Abstract

Empowerment emphasizes the participation, so they need to participate fully in decision-making processes of their lives. Participation of family planning is one of the factors that influence women's empowerment. This research aims to study the influence of the participation of family planning to women's empowerment in West Nusa Tenggara (NTB) by using the results SDKI 2007. The unit of analysis is the married women between the ages of 15-49 years who had at least one child born alive. The independent variables are: participation of family planning, Age At First Marriage, Level of Education, Employment Status, Number of Children Ideal, and the Cohort mother. Meanwhile, the independent variable is the Women's Empowerment using Binary Logistic analysis. Participation of family planning are factors that have a significant influence on the empowerment of women in the province, women who use contraceptives have a higher tendency to experience empowerment than those not using contraception. On the other hand, a variable level of education appears to have a significant influence on the chances of women experience empowerment. It is clear that education remains a factor affecting the empowerment of women. Thus the probability of occurrence of empowerment is higher in women who use contraception and highly educated (high school and above). While other variables such as age at first marriage, employment status, the ideal number of children and birth cohorts signifikan not affect the empowerment of women. This may be because there are other factors that have a stronger influence on women's empowerment.

Keywords: *empowerment, participation, women, contraception*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai peraturan per Undang-Undang tidak membedakan antara laki dan perempuan di mana setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, Salah satu dari lima sasaran pokok dalam RPJM 2004 – 2009 berkaitan dengan agenda mewujudkan keadilan kesadaran gender dalam berbagai bidang pembangunan. Namun secara umum hingga saat ini masih banyak yang belum mengerti mengapa persoalan perempuan masih banyak yang harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi karena karena kentalnya nilai-nilai budaya patrilineal yang menempatkan laki-laki berada pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga ada pandangan umum bahwa peran utama perempuan dalam keluarga adalah reproduksi yaitu melahirkan dan membesarkan anak, dan peran produktif perempuan hanya terkait dengan tugas-tugas domestik rumah tangga. Peran ini bahkan telah mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1. Tahun 1974 pada fasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1 berbunyi: Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri dan memberikan semua kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya pada ayat 2 fasal 14 berbunyi: Sang istri memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga untuk yang terbaik dari kemampuan dirinya.

Banyak kasus dimana perempuan terutama perempuan pedesaan yang miskin bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan tetapi ketika terjadi suatu hal pada anak-anaknya misalnya sakit maka ibu tersebut dipersalahkan lalai mengurus anak-anaknya, padahal suami, keluarga, ataupun tetangga tidak menentang si ibu pergi bekerja keluar rumah (Hidayati, Hull T, dkk.. 1997).

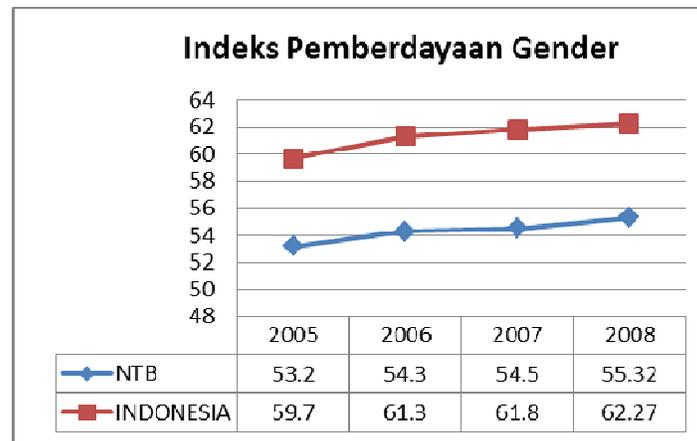
Melihat kasus tersebut, nampaknya perempuan memiliki fungsi ganda di satu sisi memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga dan pada sisi lain ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat ini pembagian kerja berdasarkan gender sudah tidak relevan lagi karena perempuan sudah mampu bersaing dengan laki-laki. Tercatat tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan telah meningkat dimana pada Tahun 2008 mencapai 37, 9 persen menjadi 38, 23

persen pada Tahun 2009, dan menjadi 38,58 persen pada Tahun 2010 (Sakernas, BPS). Mereka yang bekerja diduga mungkin dapat memberdayakan diri mereka sehingga membantu mengurangi ketimpangan gender. Proses mengurangi ketimpangan gender dalam masyarakat membawa kita untuk memperbaiki kondisi dan status perempuan di semua bidang (rumah tangga dan tingkat masyarakat) disebut sebagai pemberdayaan perempuan (UNFPA, 2008).

Gambaran kondisi pemberdayaan perempuan di NTB dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) yang diperoleh dari Laporan Pembangunan Manusia (HDR), (UNDP, 2005 s/d 2008) yang menggambarkan adanya peningkatan perempuan yang memberdayakan diri (Lihat Grafik berikut ini).

Grafik I.

Indeks Pemberdayaan Gender, Nusa Tenggara Barat dan Indonesia



Sumber: Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007 & 2008, Kementrian PP & PA bekerjasama dengan BPS

Berdasarkan grafik di atas selama kurun waktu 2005 – 2008, Indeks Pemberdayaan Perempuan di NTB terus meningkat meskipun terdapat kesenjangan dengan nasional antara 6,5 sampai 7 points. Sehingga pemberdayaan perempuan di NTB harus ditingkatkan terus.

Rendahnya Indeks Pemberdayaan Perempuan di NTB bisa jadi karena berbagai masalah kependudukan seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya status gizi ibu hamil dan menyusui, rendahnya kontrol kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencanakan rendahnya tanggungjawab laki-laki dalam kesehatan keluarga dan ber KB. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan perempuan (Hidayati, Hull T, dkk.. 1997). Sehingga jika ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan maka program Keluarga Berencana (KB) harus ditingkatkan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan kependudukan di NTB cukup kompleks antara lain angka kematian ibu melahirkan tinggi yaitu 330/100.000 kelahiran pada Tahun 2007 (SDKI) yaitu menempati urutan kedua setelah Papua, dan dapat dipastikan status gizi ibu hamil sangat rendah. Disamping itu angka kelahiran di NTB masih cukup tinggi yaitu 2,6 pada Tahun 2007, masih jauh di atas MDG's yaitu 2,1. Tambahan lagi keikutsertaan ber KB masih didominasi oleh wanita sementara keikutsertaan pria masih sangat rendah yaitu hanya 1,7% yang menggunakan kondom dan hanya 0,1% yang menggunakan kontak (SDKI, 2007). Sehingga tidak mengherankan indeks pemberdayaan perempuan di NTB masih rendah. Pemberdayaan perempuan harus mampu membebaskan perempuan dari “ideology gender dan altruisme ibu yaitu pandangan yang menempatkan kepentingan anggota keluarga terutama kaum pria di atas kepentingan perempuan sendiri. Dari permasalahan kependudukan di atas dapat difokuskan permasalahan untuk dikaji mengenai pengaruh Program Keluarga Berencana Terhadap Pemberdayaan Perempuan di NTB.

1.3. Pertanyaan Penelitian.

Pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada pengaruh program KB terhadap pemberdayaan perempuan di Provinsi NTB?
- b. Apakah tingkat pendidikan, status pekerjaan, usia saat kawin pertama, jumlah anak ideal, jumlah anak lahir hidup, dan kohor kelahiran ibu berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan di Provinsi NTB?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mempelajari pengaruh Keluarga Berencana Terhadap Pemberdayaan Perempuan.
- b. Mempelajari pengaruh usia saat kawin pertama terhadap pemberdayaan perempuan.
- c. Mempelajari pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemberdayaan perempuan.
- d. Mempelajari pengaruh status pekerjaan ibu terhadap pemberdayaan perempuan.
- e. Mempelajari pengaruh jumlah anak ideal terhadap pemberdayaan perempuan.
- f. Mempelajari pengaruh kohort kelahiran terhadap pemberdayaan perempuan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah:

- a. Untuk mahasiswa dan kalangan ilmiah lainnya dapat menambah kajian dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
- b. Untuk masyarakat pada umumnya akan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan.
- c. Untuk kalangan pembuat kebijakan, akan sangat bermanfaat untuk memahami kondisi nyata masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan guna bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berkaitan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

2.1.1. Konsep Pemberdayaan

Kata pemberdayaan sering dipergunakan untuk konteks yang berbeda. Misalnya literature tentang pemberdayaan ditemukan pada bidang pendidikan, pekerja sosial, psikologi, dalam politik AS radikal pada Tahun 1950 dan perkembangan masyarakat kelompok di Utara dan Selatan, serta di lingkungan feminis dan organisasi lainnya (Oxaal dan Baden, 1997).

The Human Development Report (1995), menekankan bahwa pemberdayaan adalah tentang partisipasi, sehingga mereka harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang membentuk kehidupan mereka (PBB, 1995 b:12), tapi pada saat yang sama menyampaikan pandangan kemampuan investasi pada perempuan dan memberdayakan mereka untuk menentukan pilihan yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan (PBB, 1995b:iii).

Sedangkan Oxfam memandang pemberdayaan dari sisi yang sedikit berbeda yaitu berkaitan dengan tantangan terhadap penindasan dan ketimpangan, pemberdayaan melibatkan tantangan terhadap bentuk penindasan yang memaksa jutaan orang untuk berpelebaran dalam masyarakat yang tidak adil atau yang mengingkari hak asasi mereka (Oxfam, 1995). Bahkan aktifis feminis menekankan bahwa pemberdayaan perempuan harus mengarah kepada pembebasan seseorang dari kesalahan sistem dan penindasan terhadap ideologi. Ini harus mengarah pada situasi dimana setiap orang dapat menjadi keseluruhan tanpa memandang jenis kelamin, dan menggunakan secara potensial untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi bagi semua (Akhtar 1992 dikutip dalam Batliwala 1994:131).

Klaim untuk pemberdayaan perempuan sebagai tujuan atau tujuan akhir dari banyak pengembangan kebijakan dan program mengarah ke permintaan untuk indikator pemberdayaan, baik untuk mengungkapkan sejauh mana perempuan sudah diberdayakan dan untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan program lebih efektif, sesuai dengan tujuan mereka. Ada berbagai cara dimana indikator pemberdayaan dapat dikembangkan. Masing-masing memiliki nilai tertentu, tetapi tidak dapat diambil sebagai langkah-langkah lengkap, karena sipat pemberdayaan sebagai konsep yang tidak mudah terukur (Oxaal dan Baden, 1997). Berikut ini adalah beberapa indikator Pemberdayaan Perempuan (CIDA, 1997).

- a. Indikator di bidang politik
 - Penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.
 - Jumlah kasus yang berkaitan dengan hak-hak perempuan yang ditemukan di pengadilan local dan hasilnya.
 - Jumlah kasus yang berkaitan dengan hak-hak hukum perempuan yang bercerai dan janda yang ditemukan di pengadilan lokal dan hasilnya.
 - Meningkatkan atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
 - Persentase hakim perempuan, jaksa, dan pengacara di tingkat lokal; perentase perempuan di kepolisian setempat.
- b. Indikator di bidang hukum
 - Persentase perempuan di kursi pemerintah daerah, dewan lokal, dan badan pengambil keputusan.
 - Persentase perempuan di layanan sipil setempat.
 - Persentase perempuan yang terdaftar sebagai pemilih.
 - Persentase perempuan yang benar-benar memilih.
 - Persentase perempuan anggota serikat.
 - Persentase perempuan di posisi sebagai senior dan junior dalam pengambilan keputusan di serikat.
 - Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam protes public dan kampanye politik.
- c. Indikator di bidang social
 - Jumlah perempuan dalam organisasi local seperti asosiasi perempuan, dll.
 - Jumlah perempuan yang menempati jabatan tertentu dalam organisasi-organisasi.
 - Luas pelatihan atau jaringan antara perempuan lokal, dibandingkan dengan laki-laki.
 - Autonomi perempuan atas keputusan fertilitas, jumlah anak, jumlah aborsi, dll.
 - Mobilitas perempuan.

Pada kenyataannya, variabel pemberdayaan perempuan memiliki berbagai indikator, namun dalam penelitian ini peneliti akan lebih mencermati indikator di bidang sosial terutama yang berkaitan dengan keluarga berencana

Berdasarkan berbagai uraian di atas, peneliti mengambil definisi pemberdayaan dari The Human Development Report (1995) yang menekankan bahwa pemberdayaan adalah tentang partisipasi, sehingga mereka harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang membentuk kehidupan mereka (PBB, 1995 b:12). Jadi dapat dikatakan bahwa jika perempuan memiliki otonomi maka mereka telah mengalami pemberdayaan dalam keluarganya. Sehingga peneliti menggunakan variabel otonomi terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan rumah tangga sehari-hari untuk menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan di Provinsi NIB.

2.1.2. Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana (KB) mengacu pada pasokan dan jasa yang memungkinkan individu dan pasangan untuk mencapai dan merencanakan jumlah anak yang mereka inginkan, dan jarak serta waktu kelahiran. Kebutuhan meliputi kebutuhan kontrasepsi modern seperti pil, suntikan, IUD, implant dan kondom. Layanan ini meliputi layanan kesehatan, konseling dan informasi serta pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi (IPPF, 2012).

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap program KB mulai didengungkan pada awal Tahun 1970-an. Sejak saat itulah dimulainya kisah sukses perkembangan Program KB dan Program KB menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan. Selain itu, Program KB adalah salah satu program yang mendapat dukungan dari negara-negara donor yang membantu Indonesia, termasuk NTB sehingga banyak bantuan pembiayaan datang dari negara donor tersebut (Adioetomo, 2009).

Pada awal program KB di Nusa Tenggara Barat yaitu Tahun 1971-1980, laju pertumbuhan penduduk (LPP) masih tinggi, rata-rata 2,36% pertahun, periode 1980-1990 turun menjadi rata-rata 2,15% pertahun, dan periode 1990-2000 turun cukup signifikan menjadi rata-rata 1,34% pertahun. Salah satu indikator perkembangan fertilitas adalah Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total. Berdasarkan data statistic BPS, sejak Tahun 1968 hingga Tahun 2000, TFR di NTB cenderung terus menurun secara signifikan yaitu dari 6,49 Tahun 1977

menjadi 3,68 pada Tahun 1992 dan menjadi 2,69 pada Tahun 2000. Penurunan ini tidak terlepas dari keberhasilan program KB.

Keberhasilan program KB terlihat pula dari meningkatnya kesertaan ber KB dari tahun ke tahun. Peningkatan kesertaan ber KB biasanya selalu diikuti penurunan TFR. Di NTB pada Tahun 1994 kesertaan ber KB 49,80% dengan TFR 3,64, Tahun 1997 kesertaan ber KB 56,50% dengan TFR 2,95, Tahun 2002/2003 kesertaan ber KB 53,50% dengan TFR 2,40 dan Tahun 2007 kesertaan ber KB 54,80% dengan TFR 2,69 (SDKI 1994, 1997,2002/2003, 2007). Tetapi kecendrungan di atas tidak terjadi pada Tahun 2012 dimana di NTB peningkatan kesertaan ber KB yang meingkat menjadi 56% sedangkan TFR nya tidak menurun melainkan meningkat menjadi 2,8 (data sementara SDKI 2012). Keberhasilan program di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 TFR dan Pemakaian Alat/Cara keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Barat, SDKI 1994,1997, 2002/2003, 2007, 2012

Indikator	Prosentase				
	1994	1997	2002/2003	2007	2012
TFR	3,64	2,95	2,40	2,69	2,80
CPR	49,80	56,50	53,50	54,80	56,0
PIL			10,9	7,0	3,8
IUD			4,3	4,6	7,1
Suntikan			28,7	33,5	36,8
Kondom			0,0	0,4	0,5
Susuk KB			6,9	4,3	5,4
MOW			1,6	2,0	1,4
MOP			0,0	2,3	0,0
MAL			0,1	0,0	0,1

Sumber: SDKI 1994, 1997, 2002/2003,2007, dan data sementara SDKI 2012.

Namun demikian program KB masih merupakan urusan wajib perempuan karena selain pilihan alat kontrasepsi yang tersedia lebih banyak untuk perempuan yaitu lebih 90%, juga peserta KB sebagian besar adalah perempuan dan hanya sebagian kecil laki-laki.

2.2. Studi Empiris

2.2.1. Status Dan Pemberdayaan Perempuan.

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan rendahnya status perempuan di Negara berkembang pada umumnya dan di Ethiopia Khususnya (Almaz, 1991; Hirut, 204; Mukuria et al, 2005). Kurangnya akses ke sumber daya produktif seperti tanah; kurangnya akses ke pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan dasar, dan perlindungan hak dasar manusia; rendahnya pengambilan keputusan, kekerasan dan praktek-praktek tradidisional yang berbahaya adalah beberapa indikator sosial ekonomi marjinalisasi perempuan di negara ini. Rendahnya status wanita tersebut juga menggambarkan rendahnya pemberdayaan perempuan di Negara tersebut.

Studi lainnya yang menggambarkan rendahnya status perempuan ditemukan penelitian yang dilakukan Hidayati Amal dkk, (1997) dan Dwiyanto dkk. (1997). Temuan Hidayati Amal dkk. menunjukkan adanya pembagian kerja berdasarkan gender baik di Jakarta maupun Ujung Pandang, dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga sementara wanita mengurus rumah tangga terutama berkaitan dengan mengasuh anak dan memasak, seperti halnya yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Pembagian tugas rumah tangga serupa juga ditemukan pada studi di Jawa Timur dan Jawa Tengah (Dwiyanto dkk, 1997). Pada dasarnya pembagian kerja berdasarkan gender dapat membawa hubungan gender yang tidak setara dalam keluarga, karena ketergantungan ekonomi perempuan pada suami cenderung dapat menempatkan istri pada posisi yang lebih rendah dari pada suami.

2.2.2. Keluarga Berencana, Otonomi Dan Pemberdayaan Perempuan

Keluarga Berencana memberikan kesempatan kepada perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam peran mereka yang lain dengan mengurangi peran mereka merawat anak. Kehadiran seorang anak kecil (atau anak-anak) berarti bahwa waktu perempuan banyak terserap untuk tugas merawat, sebaliknya memiliki keluarga yang lebih kecil mengurangi tahun dimana seorang memiliki anak pra-sekolah di rumah, dengan demikian waktu luang yang dimilikinya akan lebih banyak sehingga meningkatkan kemampuannya untuk bekerja (jika menginginkan-nya) dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (Hardee dkk, 1998).

Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita yang menggunakan kontrasepsi lebih cenderung aktif di tenaga kerja. Hal ini memberikan mereka kekuasaan yang lebih produktif dan kemampuan untuk

meningkatkan keamanan mereka sendiri dan ekonomi keluarga. Selain itu, Keluarga Berencana memungkinkan perempuan untuk mengkoordinasikan waktu anak-anak mereka dan ukuran keluarga mereka dengan kebutuhan mereka dan keinginan untuk mendapatkan upah. Pada akhirnya, seorang wanita yang dapat merencanakan keluarganya lebih mampu merencanakan hidupnya (IPPF,2012).

Hardee, dkk (1996) kemudian menggambarkan peta hubungan tersebut dalam suatu konsep. Dalam kerangka konsepnya, Hardee menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik tampaknya memberikan pengaruh yang kuat pada banyak aspek kehidupan perempuan. Program Keluarga Berencana sebagai implementasi dari berbagai faktor tersebut, yang meliputi perencanaan, pembatasan, dan penjarakan kehamilan serta kesehatan reproduksi lainnya berpengaruh baik secara fisik maupun psikologis terhadap kehidupan perempuan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang menyangkut kecukupan pendapatan dan pendidikan anak. Gerakan Keluarga Berencana telah menjadi kendaraan utama untuk mengubah hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

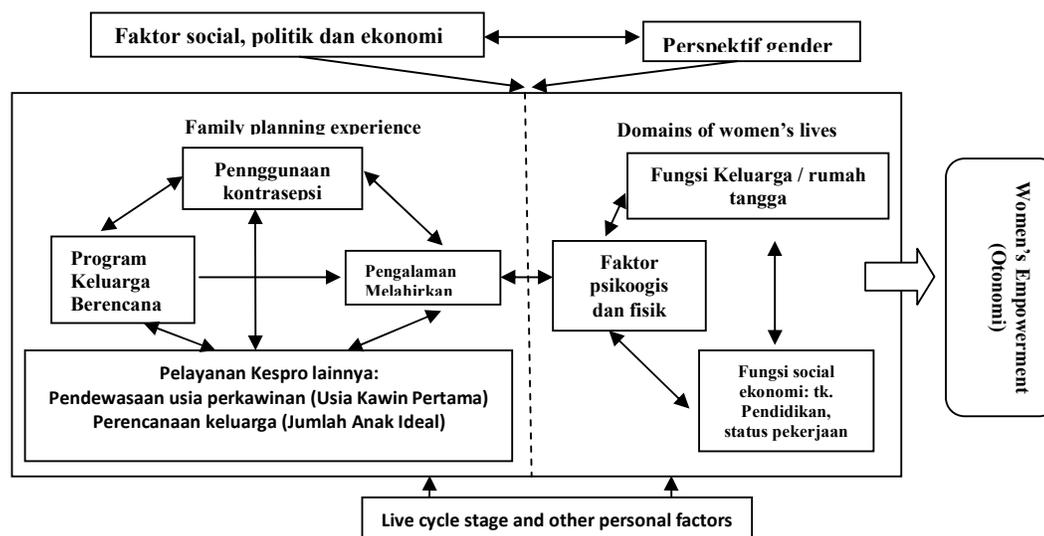
2.2.3. Tingkat Pendidikan, Wanita Bekerja, Dan Pemberdayaan Perempuan.

Hingga saat ini variabel pendidikan dan pekerjaan yang biasa digunakan untuk menangkap pemberdayaan dan konsep terkait lainnya seperti otonomi dan status perempuan. Penggunaan mereka dibenarkan oleh fakta bahwa mereka memiliki korelasi positif yang kuat dengan indikator pemberdayaan langsung. Tingkat pendidikan seorang wanita dan status pekerjaannya, memiliki hubungan positif dengan pemberdayaan (Mason, 1986; Kishor, 2000).

Telah banyak diperdebatkan apakah wanita yang mampu menghasilkan uang dengan bekerja di luar rumah akan lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan rumah tangga (memiliki otonomi) atau tidak. Stoler (1977) menemukan bahwa perempuan Jawa di pedesaan yang miskin memiliki akses lebih banyak pada kesempatan kerja, meskipun menjadi tenaga kerja kasar, oleh karena itu mereka memiliki otonomi dalam keluarga. Stoler juga menemukan bahwa perempuan desa yang kaya juga cenderung memiliki otonomi dalam keluarga, yang menyebabkan para wanita memiliki hubungan yang lebih setara atas kegiatan (termasuk partisipasi angkatan kerja) anggota rumah tangga lainnya. Hull (1982), dalam sebuah studi tentang status perempuan di pedesaan Jawa Tengah, disepakati bahwa kelas sosial harus dipertimbangkan ketika meneliti hubungan antara status kerja dan otonomi perempuan.

2.3. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pikir penelitian disusun berdasarkan pengembangan dari kerangka teori Hardee, dkk (1966) dan dibentuk sedemikian rupa sehingga mampu menjelaskan suatu analisis hubungan antara pemberdayaan perempuan di lingkungan keluarga dalam hal ini yang akan diteliti mengenai status otonomi perempuan dengan faktor sosial ekonomi demografi individu wanita kawin. Penelitian ini memilih dan menetapkan beberapa faktor yang dinilai memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan perempuan dari wanita kawin di Provinsi NTB, faktor-faktor tersebut antara lain kesertaan ber KB, pendidikan ibu, status kerja ibu, usia saat kawin pertama, dan anak lahir hidup. Kerangka pemikiran yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Program KB Terhadap Pemberdayaan Perempuan

Gambar 2.1. menjelaskan faktor-faktor tersebut antara lain kesertaan ber KB, usia kawin pertama, jumlah anak lahir hidup, pendidikan ibu, status kerja ibu, jumlah anak ideal, dan kohor kelahiran ibu.

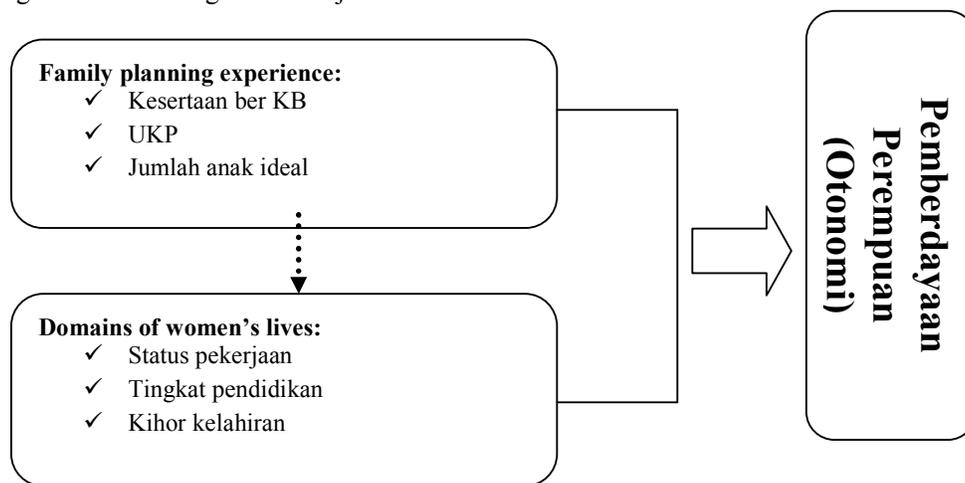
Pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah Program Keluarga Berencana, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan (kesertaan ber KB, usia kawin pertama, jumlah anak lahir hidup). Diasumsikan bahwa kesertaan ber KB, usia kawin pertama, jumlah anak lahir hidup akan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Keluarga Berencana memberikan kesempatan kepada perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam peran mereka yang dengan mengurangi beban mereka dalam satu peran yaitu merawat anak, sehingga mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk meningkatkan kemampuannya untuk bekerja (jika dia ingin) dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Faktor lain yang sering diasumsikan memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan perempuan adalah pendidikan dan status pekerjaan. Umumnya pendidikan akan mempengaruhi kesempatan seseorang untuk bekerja. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, semakin luas kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun wanita yang dipandang mampu menghasilkan uang dengan bekerja di luar rumah akan lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan rumah tangga (memiliki otonomi). Status pekerjaan seseorang juga akan menjadikan perempuan lebih mandiri termasuk dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan rumah tangga termasuk yang berkaitan dengan reproduksi. Dengan kata lain, bekerja menjadikan mereka lebih otonom sehingga mereka lebih dapat memberdayakan diri mereka. Seperti yang dikemukakan Mason (1986) dan Kishor (2000), bahwa tingkat pendidikan seorang wanita dan status pekerjaannya, memiliki hubungan positif dengan pemberdayaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian digunakan untuk melihat pengaruh faktor-faktor sosial demografi terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan. Dalam penelitian ini wanita dipilih sebagai pusat penelitian dengan mengasumsikan jawaban dari responden merupakan representasi dari keinginan individu. Untuk keperluan analisis maka peneliti membentuk kerangka analisis yang merupakan penyederhanaan dari kerangka pemikiran yang sebelumnya dibentuk. Skema hubungan tersebut sebagaimana disajikan dibawah ini.



Gambar 3.1 Kerangka Analisis Pemberdayaan Perempuan

3.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hipotesis yang akan diuji adalah:

- a. Di NTB, wanita yang ikut KB berpeluang lebih tinggi memiliki otonomi dari pada yang tidak ikut KB.

- b. Di NTB, wanita yang usia kawin pertamanya lebih muda (di bawah 20 tahun) berpeluang lebih rendah memiliki otonomi dari pada yang usia kawin pertamanya lebih tua (20 tahun ke atas).
- c. Di NTB, wanita yang jumlah anak idealnya lebih dari tiga berpeluang lebih rendah memiliki otonomi dari pada yang jumlah anak idealnya kurang dari tiga.
- d. Di NTB, wanita yang berpendidikan tinggi berpeluang lebih tinggi memiliki otonomi dari pada yang berpendidikan rendah.
- e. Di NTB, wanita yang bekerja berpeluang lebih tinggi memiliki otonomi dari pada yang tidak bekerja.
- f. Di NTB, wanita yang berada pada kohor yang lebih muda (kelahiran 1977-1992) berpeluang lebih tinggi memiliki otonomi dari pada yang berada pada kohor yang lebih tua (kelahiran 1958-1976).

3.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data skunder yang bersumber dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007. Survei ini dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, yang dirancang khusus untuk tujuan-tujuan berikut:

- a. Menyediakan data mengenai fertilitas, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu, AIDS dan PMS untuk pengelola program, pengambil kebijakan, dan peneliti untuk membantu mereka dalam mengevaluasi dan meningkatkan program yang ada.
- b. Mengukur tren angka fertilitas dan pemakaian KB serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya, seperti pola dan status perkawinan, daerah tempat tinggal, kebiasaan menyusui, pengetahuan, penggunaan, serta ketersediaan alat kontrasepsi.
- c. Mengukur pencapaian sasaran yang dibuat sebelumnya oleh program kesehatan nasional dengan fokus pada kesehatan ibu dan anak.
- d. Menilai partisipasi dan penggunaan pelayanan kesehatan oleh pria, juga keluarganya.
- e. Menciptakan data dasar yang secara internasional dapat dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat digunakan oleh para pengelola program, pengambil kebijakan, dan peneliti pada bidang KB, fertilitas, dan kesehatan secara umum.

Data individu wanita pernah kawin umur 15-49 tahun di dalamnya mencakup karakteristik responden seperti umur, status perkawinan, pendidikan dan pemanfaatan media; pengetahuan dan penggunaan metode keluarga berencana, preferensi fertilitas, pemeriksaan kehamilan, persalinan dan masa nifas, pemberian air susu ibu dan makanan bayi, vaksinasi dan penyakit anak, pekerjaan responden dan karakteristik suami responden, kematian masa kanak-kanak, pengetahuan dan perilaku mengenai AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, kematian saudara kandung termasuk kematian ibu.

Dijelaskan dalam buku pedoman BPS Provinsi Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2007 bahwa metode sampling yang digunakan adalah sampling dua tahap (two stage design). Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan blok sensus terpilih Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2007. Prosedur penarikan sampel SDKI 2007 untuk tahap pertama adalah pemilihan blok sensus secara sistematik PPS (probability proporsional to size) berdasarkan kerangka blok sensus. Tahap kedua, pemilihan 25 rumah tangga untuk setiap blok sensus terpilih SDKI 2007 secara sistematik berdasarkan hasil listing rumah tangga Sakernas 2007. Pengumpulan data SDKI 2007 pada rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Keterangan rumah tangga yang dikumpulkan melalui kuesioner Modul RT ditanyakan kepada kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang paling mengetahui informasi yang ditanyakan. Sedangkan pengumpulan data untuk Modul WPK (wanita pernah kawin) ditujukan pada semua anggota rumah tangga wanita yang pernah kawin berumur 15-49 tahun. .

3.4. Keterbatasan Data

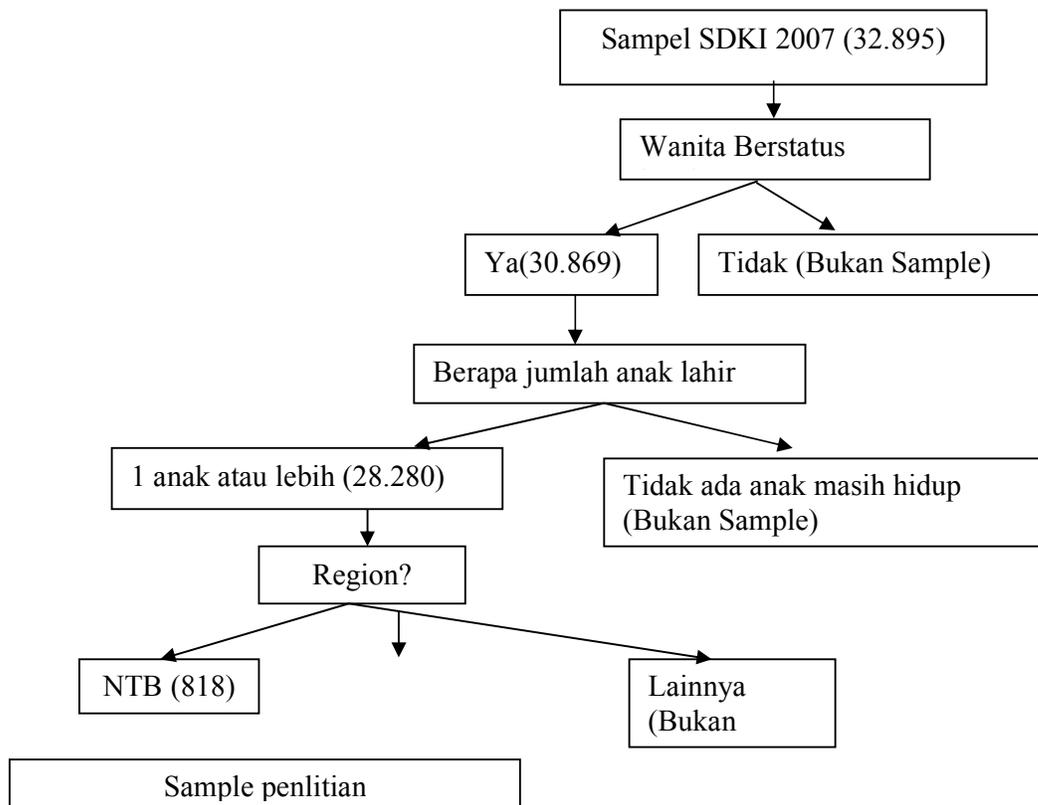
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari satu pihak yaitu isteri saja bukan pasangan. Hal ini mengacu pada pandangan Morgan (1985) yang menyatakan bahwa informasi dari salah satu anggota pasangan cukup akurat untuk menjadi kumpulan data sehingga data SDKI 2007 dipandang cukup mendukung.

3.5. Unit Analisis

Unit analisis sumber data penelitian adalah wanita berstatus kawin, usia 15-49 tahun, memiliki sedikitnya satu orang anak masih hidup. Sampel yang dipergunakan adalah bagian dari sampel SDKI 2007 yaitu wanita kawin usia 15-49 dengan anak hidup sedikitnya satu orang. Batasan status sampel berdasarkan daftar pada beberapa pertanyaan Survey Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2007. Batasan untuk status kawin berdasarkan pertanyaan P106A yaitu status perkawinan responden. Pertanyaan P106A adalah: *Apakah ibu sekarang berstatus kawin, cerai hidup, cerai mati?*. Sampel SDKI 2007 dinyatakan sampel penelitian apabila jawaban responden berstatus kawin.

Untuk riwayat kelahiran berdasarkan pertanyaan P201: *Apakah ibu pernah melahirkan?*. Akan menjadi sampel apabila responden menjawab Ya. Selanjutnya mengenai jumlah anak berdasarkan pertanyaan P203 dan P205. Pertanyaan P203: *Berapa jumlah anak laki-laki tinggal bersama ibu? dan berapa jumlah anak perempuan tinggal bersama ibu?*. Untuk pertanyaan P205: *Berapa jumlah anak laki-laki yang masih hidup tetapi tidak tinggal bersama ibu?. Dan berapa jumlah anak perempuan yang masih hidup tapi tidak tinggal bersama ibu?*. Pertanyaan ini dilengkapi P207 yang isinya: *Berapa jumlah anak laki-laki yang sudah meninggal? Dan berapa jumlah anak perempuan yang sudah meninggal?*. Hasil pertanyaan P203, P205, dan P207 dijumlahkan untuk memperoleh jumlah anak lahir hidup dan yang menjadi responden adalah yang memiliki sedikitnya satu anak lahir masih hidup.

Batasan selanjutnya adalah responden menjadi sampel apabila bertempat tinggal di Provinsi NTB, dengan pertanyaan P201; *Pengenalan tempat provinsi?*. Sehingga yang menjadi sampel adalah wanita kawin, sedikitnya satu anak masih hidup, masih dalam pernikahan dan tinggal di NTB. Aluran pemikiran tentang sampel dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.2 Alur Pemilihan Sample Penelitian

3.6. Definisi Operasional

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel terikat atau tidak bebas dan variabel bebas. Variabel terikat adalah pemberdayaan perempuan, sedangkan variabel bebas wanita dalam perkawinan dengan karakteristik sosial demografi kesertaan ber KB, pendidikan ibu, status kerja, usia saat kawin pertama, jumlah anak lahir hidup, dan kohor kelahiran ibu.

3.6.1. Variabel Terikat Atau Tidak Bebas.

Studi menggunakan model Binomial Logit *Regression*. Model ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya peningkatan pemberdayaan perempuan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Peneliti menggunakan variabel otonomi dalam keluarga untuk menjelaskan terjadinya peningkatan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ini sesuai dengan pendapat The Human Development Report (1995) yang menekankan bahwa pemberdayaan adalah tentang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan proses yang membentuk kehidupan mereka (PBB,1995 b:12).

Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah tingkat otonomi pengambilan keputusan menyangkut lima jenis keputusan yaitu: pemeriksaan kesehatan responden, pembelian barang tahan lama untuk kebutuhan rumah tangga, pembelian kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kunjungan ke keluarga, dan jenis makanan yang akan dimasak setiap harinya. Pembentukan variabel status gender ibu berdasarkan pada pertanyaan SDKI 2007 yaitu P179; *Siapa dalam keluarga yang biasanya memutuskan pembelian kebutuhan sehari-hari?*

Otonomi merupakan variabel dependen atau terikat atau tidak bebas. Variabel ini dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu ikut dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Pemberdayaan –wanita1 = ikut dalam mengambil keputusan

Pemberdayaan - wanita2 = tidak ikut mengambil keputusan (katagori *reference*)

3.6.2. Variabel Bebas.

Variabel bebas yang digunakan dalam faktor-faktor yang telah ditentukan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan, yaitu:

1. Kesertaan Ber KB.

Kesertaan ber KB adalah penggunaan suatu alat/cara KB tertentu sebagai upaya untuk menunda atau mencegah kehamilan. Pembentukan variabel kesertaan ber KB ini berdasarkan pertanyaan SDKI 2007 P310: *Apakah ibu sekarang memakai suatu alat/cara KB untuk menunda atau mencegah kehamilan?* Variabel kesertaan ber KB didefinisikan sebagai variabel kategorik yang dikelompokkan menjadi dua yaitu ikut ber KB dan tidak ikut ber KB. KB1 = ikut ber KB; KB0 = tidak ikut ber KB.

2. Usia Saat Kawin Pertama.

Usia tersebut adalah saat responden menikah dengan suaminya (yang pertama). Pembentukan variabel ini berdasarkan pertanyaan SDKI 2007 yaitu P512: *Berapa umur ibu ketika menikah dengan suami ibu yang pertama?* Variabel usia kawin didefinisikan sebagai variabel kategorik yang dikelompokkan menjadi dua yaitu usia bawah 29 tahun dan usia atas 20 tahun. UKP0 = usia dibawah 20 tahun; UKP1 = usia 20 tahun ke atas.

3. Tingkat Pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan responden. Pembentukan variabel pendidikan berdasarkan pertanyaan SDKI 2007 yaitu P107: *Apakah ibu pernah sekolah?* Pertanyaan P108: *Apakah jenjang sekolah tertinggi yang pernah/ sedang dilalui?* Dan pertanyaan P109: *Apakah kelas/tingkat tertinggi yang ibu selesaikan pada jenjang tersebut?* Variabel pendidikan didefinisikan sebagai variabel katagorik yang dikelompokkan menjadi 3 katagori yaitu berpendidikan SD ke bawah, tamat SLTP, atau SLTA dan tamat perguruan tinggi. Educ0 = SD ke bawah; Educ1 = tamat SLTP; Educ2 = tamat SLTA ke atas.

4. Status Pekerjaan ibu.

Yang dimaksud status kerja adalah dimana responden mempunyai pekerjaan atau tidak. Disebut bekerja jika dalam periode seminggu sebelum wawancara berusaha untuk mendapat penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam berturut-turut atau mempunyai pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja karena cuti, mogok dan sebagainya. Pembentukan variabel status kerja berdasarkan pertanyaan P707: *Di samping mengurus rumah tangga apakah ibu bekerja?* Dan pertanyaan P109: *Dalam 12 bulan terakhir apakah ibu pernah bekerja?* Variabel status kerja didefinisikan sebagai variabel kategorik dan dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Kerja1 = Bekerja, Kerja0 = tidak bekerja (katagori *reference*).

5. Jumlah anak ideal adalah jumlah anak yang diinginkan seandainya ia bisa mulai dari awal lagi, termasuk jumlah laki dan perempuan. Pembentukan variabel jumlah anak ideal

berdasarkan pertanyaan SDKI 207 P614: *Seandainya ibu dapat kembali ke waktu ibu baru saja menikah dan belum mempunyai anak dan ibu dapat menentukan jumlah anak yang ibu inginkan selama hidup, berapa jumlah anak tersebut?* Variabel jumlah anak ideal didefinisikan sebagai variabel katagorik dan dikelompokkan menjadi tiga katagori.

Ideal1 = 1-2 anak; ideal2 = 3 anak; ideal0 = lebih dari 3 anak.

6. Kohor ibu.

Kohor ibu adalah tahun kelahiran wanita yang dihitung saat survey atau saat survey berusia 15 sampai 49 tahun. Variabel ini dibentuk berdasarkan pertanyaan SDKI 2007 P106: *Berapa umur ibu pada ulang tahun terakhir?* Kemudian peneliti mendefinisikan sebagai variabel katagorik yang dikelompokkan menjadi dua katagori:

Kohor1 = 1977 – 1992; Kohor0 = 1958 – 1976 (katagori reference).

3.7. Metode analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kedua metode ini saling melengkapi guna memperoleh hasil sebagaimana diharapkan.

3.7.1. Analisis Deskriptif.

Analisis deskriptif menyajikan data atau nilai-nilai dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram (agung, 2004) secara sederhana yang diharapkan akan lebih mudah difahami.

3.7.2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan sampel apakah dapat berlaku umum (generalisasi). *Model binomial logit regression* digunakan dalam tesis ini untuk melihat rasio kecendrungan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penggunaan binomial logit dengan pertimbangan variabel terikat merupakan variabel katagorik. Model ini diaplikasikan setelah dilakukan pemilahan data (*select cases*) yaitu wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Analisis inferensial yang diterapkan adalah metode regresi logistic biner multi factorial dengan variabel tidak bebas katagorik biner atau zero one variabel independent. Secara umum persamaan model regresi logistic biner sebagai berikut.

$$\ln \left[\frac{p}{(1-p)} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$$

Keterangan:

p = Peluang terjadinya pemberdayaan perempuan.

$1-p$ = Peluang tidak terjadinya pemberdayaan perempuan.

X_k = Variabel katagorik

Analisis inferensial digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel peningkatan paritas perempuan kawin. Estimasi peningkatan paritas perempuan kawin dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang diajukan T. Paul Schultz (Yale University, 1981) yang diadopsi dari model yang dikembangkan Heckman (1974) dan James Tobin (1958).

Estimasi dilakukan terhadap pemberdayaan perempuan yaitu probabilitas seorang perempuan untuk diberdayakan atau tidak. Karena peluang berada pada wanita kawin, merupakan variabel dikotomi yang bernilai 1 bila diberdayakan dan 0 jika tidak diberdayakan, maka metode estimasi yang digunakan adalah dengan menggunakan model logistik biner yang diestimasi dengan *maximum likelihood estimation*.

Sehingga model logit pada penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$\ln \left[\frac{p}{(1-p)} \right] = \beta_0 + \beta_1 KB1 + \beta_2 UKP1 + \beta_41 ideal1 + \beta_42 ideal2 + \beta_51 educ + \beta_52 educ 2 + \beta_6 kerja 1 + \beta_7 kohor1 + \epsilon_i$$

Keterangan:

p = Peluang terjadinya pemberdayaan perempuan.

$1-p$ = Peluang tidak terjadinya pemberdayaan perempuan.

KB1 = Ikut KB

Educ1 = Pendidikan SMP

Educ2 = Pendidikan SMA ke atas

Kerja1	=	Bekerja
Ideal1	=	1-2 Anak ideal
Ideal 2	=	3 Aanak ideal
Kohor1	=	Kelahiran Tahun 1976 – 1992.

3.8. Uji Model.

3.8.1. Uji Keseluruhan Model.

Untuk mengetahui peran seluruh vaariabel bebas dalam model secara bersama-sama dapat dipakai uji-G (likelihood rasio test) atau uji signifikansi model dengan hipotesis. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai observasi terhadap nilai dugaannya yang diperoleh pada model yang terbentuk dengan model penuh.

Dalam menentukan kelayakan model yang terpilih, statistik uji G dapat digunakan dengan hipotesis:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

(tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat).

$$H_1: \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0,$$

(minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat).

Dengan statistik uji G yang digunakan:

$$G = -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood (model B)}}{\text{likelihood (model A)}} \right]$$

Model B merupakan model yang terdiri dari satu konstanta tanpa variabel bebas, sedangkan model A merupakan model yang terdiri dari seluruh variabel bebas.

Statistik uji G mengikuti besaran Chi-Kuadrat dengan drajat bebas k. Ho akan ditolak apabila $G > X^2$ atau p-value $< \alpha$ yang berarti ada sedikitnya satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Jika Ho ditolak berarti model tersebut sesuai atau cocok digunakan dan dapat dilakukan proses selanjutnya.

3.8. 2. Uji Signifikansi Tiap-Tiap Parameter.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu, yaitu pengaruh komposisi jenis kelimainanak terhadap peningkatan paritas, digunakan uji koefisien parameter β secara parsial yaitu dengan uji wald. Hipotesis uji wald adalah:

$$H_0 : \beta_j = 0 \text{ (tidak terdapat pengaruh variabel bebas ke j terhadap variabel terikat)}$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0 \text{ (terdapat pengaruh variabel bebas ke j terhadap variabel terikat)}$$

Uji statistik yang digunakan adalah:

$$W = \left(\frac{\beta_j}{se(\beta_j)} \right)^2$$

Dimana β_j merupakan penduga dari β_j dan $se(\beta_j)$ adalah penduga standar error dari β_j statistik W diasumsikan mengikuti sebaran Chi-Kuadrat dengan derajat bebas sebesar 1. Dengan demikian, tolak H_0 jika $W > \lambda_{(1,0)}$ atau p value $< \alpha$, dengan tingkat signifikansi yang dipilih, artinya parameter tersebut signifikansi secara statistik pada tingkat signifikansi α .

Odds rasio.

Interpretasi koefisien-koefisien dalam model regresi loogistik dilakukan dalam bentuk odds rasio (perbandingan resiko) atau dalam adjusted probability (Nachrowi dan Usman, 2008) odds rasio didefinisikan $p = \frac{p}{1-p}$ (risiko) dan 1-p menyatakan probabilitas gagal ($y=0$). Namun dalam penelitian ini odds rasio digunakan untuk mengetahui kecendrungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pilihan kontrasepsi di Indonesia. Masing-masing odds penyebutnya merupakan probabilitas dari katagori perbandingan dari variabel terikatnya (Rutherford and Choe, 1996).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data akan dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di Provinsi NTB. Variabel-variabel yang digunakan untuk

menjelaskan terjadinya pemberdayaan perempuan antara lain adalah kesertaan ber KB, usia saat kawin pertama, tingkat pendidikan, status pekerjaan, jumlah anak ideal, dan kohor kelahiran wanita. Variabel kesertaan ber KB merupakan variabel utama dalam penelitian ini.

4.1. Gambaran Umum Sampel.

Subyek dalam penelitian ini adalah wanita kawin yang memiliki sedikitnya satu anak hidup di Provinsi NTB. Total wanita kawin tersebut dalam SDKI 2007 adalah 818 orang.

4.2. Analisis Deskriptif.

Tabel berikut ini akan memberikan gambaran umum dari unit analisis menurut karakteristik yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.1. Jumlah Dan Prosentase Wanita Kawin Menurut Kesertaan ber KB, Usia Saat Kawin Pertama, Jumlah Anak Lahir Hidup, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Jumlah Anak Ideal, Dan Kohor Kelahiran Wanita Di NTB,

Karakteristik	N	%
Kesertaan ber KB		
Tidak Pakai Kontrasepsi	96	11,7
Pakai Kontrasepsi	722	88,3
Total	818	100,0
Usia Kawin Pertama		
Usia di bawah 20 Thn	478	58,4
Usia 20 Thn ke atas	340	41,6
Total	818	100,0
Tingkat pendidikan ibu		
SD ke bawah	463	56,6
SLTP	309	37,8
Tamat SLTA ke atas	46	5,6
Total	818	100,0
Status Pekerjaan Ibu		
Tidak Bekerja	361	44,1
Bekerja	457	55,9
Total	818	100,0
Jumlah Anak Ideal		
1-2 anak	351	42,9
3 anak	157	19,2
Lebih dari 3 anak	310	37,9
Total	818	100,0
Kohor Kelahiran		
Kohor 1977 – 1992	326	39,9
Kohor 1958 – 1976	492	60,1
Total	818	100,0

Tabel 4.1. menggambarkan distribusi sebaran sampel menurut kesertaan ber KB, Usia Saat Kawin Pertama, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Jumlah Anak Ideal, Dan Kohor Kelahiran Ibu. Menurut kesertaan ber KB nampak bahwa 88,3% dari 818 wanita kawin yang sedikitnya memiliki satu anak di NTB menggunakan kontrasepsi dan sisanya tidak menggunakan.

Dilihat dari usia saat kawin pertama dan memiliki sedikitnya satu anak di NTB, 58,4% menikah di bawah usia 20 tahun, sedangkan selebihnya yaitu 41,6% menikah di atas 20 tahun.

Dari sisi tingkat pendidikan sebagian besar wanita kawin yang memiliki anak sedikitnya satu orang (56,6%) menamat pendidikan hanya sampai tingkat SD, belum mampu menyelesaikan pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar atau setingkat SMP 37,8% dan tingkat SLTA ke atas hanya 5,6%.

Dari sisi status pekerjaan, 55,9% wanita kawin dan memiliki sedikitnya satu anak hidup adalah bekerja, Sisanya dalam jumlah yang lebih sedikit yaitu 44,1% tidak bekerja. Dari pandangan jumlah anak ideal ternyata sedikit maupaun banyak anak menyebar lebih merata. 37,9% memandang 4 anak atau lebih adalah jumlah yang ideal, 42,9% memandang satu atau dua anak ideal dan selebihnya sekitar 18,2% memandang tiga anak adalah ideal

Dari sisi kohor kelahiran, di NTB, prosentase wanita kawin dan memiliki sedikitnya satau anak lebih didominasi oleh kelompok kelahiran 1958 sampai 1976 yang mencapai 60,1%. Hampir separuhnya yaitu sekitar 39,9% kelompok kelahiran 1977 sampai dengan 1992.

4.2.1. Pola Dan Perbedaan Pemberdayaan Perempuan Menurut Kesertaan Ber KB Di NTB.

Sesuai definisi operasional pemberdayaan perempuan menekankan pada partisipasi sehingga harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang membentuk kehidupan mereka sehari-hari.

Keluarga Berencana pada dasarnya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam merencanakan keluarganya. Seorang wanita yang dapat merencanakan keluarganya lebih mampu merencanakan hidupnya (IPPF, 2012). Kemampuan merencanakan tersebut secara tidak langsung menggambarkan otonomi perempuan dalam keluarga, yaitu termasuk termasuk ikut serta dalam pengambilan keputusan rumah tangga sehingga mereka dapat memberdayakan diri dalam keluarga.

Tabel 4.2. Distribusi prosentase wanita Kawin Yang Minimal Memiliki Satu Anak Hidup Menurut Kesertaan Ber KB Di Nusa Tenggara Barat, SDKI 2007.

Kesertaan ber KB	Presentase Otonomi		N Total	% Total
	Tidak Otonom	Otonom		
Tidak Pakai Kontrasepsi	4,2	95,8	96	100
Pakai Kontrasepsi	0,7	99,3	722	100

Pada Tabel 4.2. di atas terlihat bahwa di NTB, prosentase wanita kawin yang tidak otonom lebih tinggi pada mereka yang tidak pakai kontrasepsi. Sedangkan pada yang pakai kontrasepsi prosentase otonom lebih tinggi.

4.2.2. Pola Dan Perbedaan Pemberdayaan Perempuan Menurut Usia Saat Kawin Pertama, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Jumlah Anak Ideal Dan Kohor.

Di samping kesertaan ber KB peneliti juga ingin melihat prosentase terjadinya pemberdayaan perempuan menurut usia saat kawin pertama, tingkat pendidikan, staus pekerjaan, jumlah anak ideal, dan kohor kelahiran wanita di NTB. Untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Pola Dan Perbedaan Pemberdayaan Perempuan Pada Wanita Kawin Menurut Usia Saat Kawin Pertama, Jumlah Anak Ideal, Status Pekerjaan, dan Kohor Kelahiran di Nusa Tenggara Barat.

Karakteristik	Presentase Otonomi		N Total	% Total
	Tidak Otonom	Otonom		
Usia Kawin Pertama				
Usia di bawah 20 Thn	1,4	98,7	478	100
Usia 20 Thn ke atas	0,9	99,1	340	100
Tingkat pendidikan ibu				
SD ke bawah	0,9	99,1	463	100
SLTP	1,0	99,0	309	100
Tamat SLTA ke atas	4,3	95,7	46	100
Status Pekerjaan Ibu				
Tidak Bekerja	1,4	98,6	361	100
Bekerja	0,9	99,1	457	100
Jumlah Anak Ideal				
1-2 anak	1,1	98,9	351	100
3 anak	1,3	98,7	157	100
Lebih dari 3 anak	1,0	99,0	310	100
Kohor Kelahiran				
Kohor 1977 – 1992	1,2	98,8	326	100
Kohor 1958 – 1976	1,0	99,0	492	100

Pemberdayaan Perempuan Menurut Usia Saat Kawin Pertama.

Pada tabel 4.3. di atas terlihat bahwapemberdayaan perempuan menurut usia saat kawin pertama di NTB prosentase yang tidak otonom ditemukan lebih banyak pada mereka yang usianya saat kawin pertama di bawah 20 tahun.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan.

Prosentase wanita kawin yang otonom dilihat dari tingkat pendidikan baik pendidikan rendah yaitu SD sederajat maupun SLTA ke atas.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Status Pekerjaan.

Dilihat dari status pekerjaan, wanita kawin, nampak bahwa wanita yang otonom lebih banyak ditemukan pada wanita yang bekerja.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Jumlah Anak Ideal.

Jumlah anak ideal ternyata tidak membedakan prosentase pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Kohor Kelahiran Ibu.

Perbedaan kohor usia ibu ternyata tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap pemberdayaan perempuan.

Setelah melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap pemberdayaan perempuan, berikut disajikan tabel hubungan pemberdayaan perempuan menurut kesertaan ber KB dan tingkat pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.4. Distribusi Prosentase Status Pemberdayaan Perempuan (Otonomi) Pada Wanita Kawin Menurut Kesertaan Ber KB dan Tingkat Pendidikan di Nusa Tenggara Barat, SDKI 2007.

Kesertaan ber KB	Tingkat Pendidikan	Otonomi		Total N	Total %
		Tidak Otonomi	Otonomi		
Tidak pakai kontrasepsi	SD ke bawah	3,0	97,0	66	100
	SMP	6,9	93,1	29	100
	SMA ke atas	0,0	100,0	1	100
Pakai kontrasepsi	SD ke bawah	0,5	99,5	397	100
	SMP	0,4	99,6	280	100
	SMA ke atas	4,4	95,6	45	100

Berdasarkan tabel di atas ternyata pada wanita yang tidak pakai kontrasepsi, yang memiliki tingkat pendidikan SMA ke atas memiliki prosentase otonomi yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki pendidikan lebih rendah. Sedangkan pada mereka yang memakai alat kontrasepsi yang tertinggi adalah pada tingkat SMP.

4.3. Analisa Inferensial.

Hasil pengolahan regresi logistik menunjukkan bahwa model secara keseluruhan baik menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang diamati dengan probabilitas terjadinya pemberdayaan perempuan pada tingkat signifikansi lima persen. Uji keberartian model menggunakan statistik G^2 menghasilkan angka yang cukup besar. Pada model ini diperoleh nilai $-2 \log$ likelihood sebesar 85.998. Dengan demikian model yang terbentuk dapat diterima dan dianalisa lebih lanjut. Hasil uji keberartian masing-masing variabel penjelas terdapat beberapa variabel pada model ini yang secara statistik tidak signifikan yaitu Usia saat kawin pertama, status pekerjaan, jumlah anak ideal, dan kohor kelahiran tidak signifikan mempengaruhi pemberdayaan perempuan.

4.4. Model Pemberdayaan Perempuan.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Kesertaan Ber KB

Model ini memperidiksi peluang wanita mengalami pemberdayaan (otonom). Ternyata hipotesis utama dalam penelitian ini bahwa wanita di Nusa Tenggara Barat yang ikut KB berpeluang lebih tinggi mengalami pemberdayaan dapat diterima dengan ditemukannya peluang 9,232 kali lebih tinggi dari pada wanita yang tidak ikut KB. Peluang lebih tinggi ini mungkin karena wanita yang ikut KB bisa merencanakan kehidupannya secara tidak langsung mereka juga merencanakan keluarganya. Temuan ini diperkuat studi Hardee, dkk (1998) yang menggambarkan bahwa Keluarga Berencana sebagai implementasi dari faktor sosial berpengaruh kuat terhadap banyak aspek kehidupan perempuan terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan lihat Tabel 4.5.).

Tabel 4.5. Tabel Uji Wald Dan Rasio Kecendrungan Dan Pengaruh Kesertaan Ber KB, Usia Saat Kawin Pertama, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Jumlah Anak Ideal, Dan Kohor Terhadap Pemberdayaan Perempuan Di NTB.

Karakteristik	β	Wald	RK
1	2	3	4
Kesertaan ber KB			
Pakai kontrasepsi	2,223	8,978	9,232
Tidak pakai kontrasepsi			Ref
Usia Kawin Pertama			
20 tahun ke atas			
Di bawah 20 tahun			
Tingkat Pendidikan			
SMA ke atas	-2,965	6,738	0,052
SMP	-	-	-
SD ke bawah			Ref
Status pekerjaan			
Bekerja			
Tidak Bekerja			
Jumlah anak ideal			
1-2			
3			
4+			
Kohor			
1977-1992			
1958-1976			

Keterangan: Ref = Reference; = Tidak signifikan pada taraf 5%.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Usia Saat Kawin Pertama.

Usia saat kawin pertama ditemukan ternyata berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. Wanita saat kawin pertama apakah berusia di atas atau di bawah 20 tahun memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pendidikan secara umum berpengaruh dalam pemberdayaan perempuan. Namun yang menarik bahwa tingkat pendidikan ternyata tidak signifikan mempengaruhi. Bahkan nampak kecendrungan bahwa tamatan SLTA ke atas memiliki pengaruh lebih rendah (0,052 kali) dari pendidikan SD, sedangkan tingkat pendidikan SLTP tidak signifikan mempengaruhi pemberdayaan perempuan. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa wanita yang berpendidikan tinggi berpeluang lebih tinggi untuk mengalami pemberdayaan dari pada yang berpendidikan rendah. Temuan ini juga berbeda dengan hasil stdi Mason(1986) dan Kishor (2000) yang juga menjelaskan bahwa tingkat pendidikan seorang wanita memiliki hubungan positif dengan pemberdayaan. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena pendidikan bukan merupakan faktor paling dominan mempengaruhi pemberdayaan perempuan di NTB, ada faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Status Pekerjaan.

Status pekerjaan di Nusa Tenggara Barat ditemukan berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. Status pekerjaan apakah wanita bekerja atau tidak bekerja tidak secara otomatis menyebabkan wanita berdaya dalam keluarganya. Temuan ini berbeda dengan hasil studi Rondinelli, dkk (2006) di Italia yang menjelaskan bahwa kenaikan menyolok dalam partisipasi angkatan kerja perempuan secara signifikan dapat menunda transisi kelahiran anak kedua, ke tiga, dan seterusnya.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Jumlah Anak Ideal.

Jumlah anak ideal bagi wanita dalam keluarga ditemukan berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di NTB. Jumlah anak ideal baik satu atau lebih tidak mempunyai arti terhadap pemberdayaan perempuan di NTB.

Pemberdayaan Perempuan Menurut Kohor.

Hasil studi peneliti menunjukkan bahwa kedua kohort baik yang lebih muda maupun yang lebih tua berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya diperoleh kesimpulan tentang pengaruh Keluarga Berencana terhadap pemberdayaan perempuan pada wanita kawin, usia 15 – 49 tahun, memiliki anak sedikitnya satu orang di NTB sebagai berikut ini.

- a. Kesertaan ber KB merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Nusa Tenggara Barat. Wanita yang menggunakan kontrasepsi cenderung memiliki keberdayaan dalam rumah tangga terutama dalam pengambilan keputusan rumah tangga sehari-hari.
- b. Secara umum tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan wanita di NTB memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan.
- c. Faktor lain seperti usia saat kawin pertama, status pekerjaan, jumlah anak ideal dan kohor kelahiran tidak signifikan mempengaruhi pemberdayaan perempuan.

5.2. Rekomendasi.

Sesuai temuan penelitian, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Rekomendasi kebijakan.
Kesertaan ber KB ternyata terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Nusa Tenggara Barat., sehingga diharapkan urusan KB lebih membudidaya lagi dan menjadi urusan semua pihak terutama yang etrkaitan langsung. Untuk BKKBN pusat disarankan lebih memperkuat provinsi I agar lebih berdaya dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- b. Rekomendasi Penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan sedikitnya ada empat variabel yang berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. Factor yang menarik adalah status kerja. Hasil tidak signifikan bisa jadi karena jenis pekerjaan ibu-ibu sangat bervariasi atau individual. Disamping itu data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga dapat terjadi bila dipergunakan data primer hasilnya dapat berbeda. Oleh karena itu disarankan keadaan peneliti berminat untuk mengembangkan penelitian pengaruh status pekerjaan terhadap pemberdayaan perempuan dengan data lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Murtiningsih. Dkk, 2009, *100 Tahun Demografi Indonesia; Mengubah Nasib Menjadi Harapan*, Jakarta : BKKBN – LD FE UI.
- Almaz E., 1991, *Persfpective On Gender And Development*, dalam: Tsehai Berhane Selassie (Ed.) *Gender Issues In Ethiopia*, Institut Of Ethiopian Studies, Addis Ababa University, Addis Ababa.
- Badan Pusat Statistik, 1990, *Sensus Penduduk*.
....., 2000, *Sensus Penduduk*.
....., 2004, *Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2002/2003*.
....., 2008, *Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2007*.
....., 2008 s/d 2010, *Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*.
- Batliawala, Srilatha, 1994, " The Meanuing Of Women's Empowerment: New Concepts From Action", In Gita Sen, Adrienne Germain And Lincoln C. Chen (Eds), *Population Policies Reconsidered: Health, Empowerment, And Rights*, Boston: Harvard University Press, 127 – 138.
- CIDA, 1997, *Guide To Gender Sensitive Indicators*, Canadian Internasional Development Agency, Hal. 30 – 32.
- Dwiyanto A, Faturochman, Suratijah K, Sukamdi, Prawitran IAR, Tamtiari W, Widaningrum A, Hardee K And Eggleston E, 1997, *Family Planning, Family Welfare And Women's Activities In Indonesia*, Yogyakarta: Indonesia: Poppulation Studies Center, Gajah Mada University and Research Triangle Park, NC: Family Health Internasional.
- Hardee K, Ulin P, Visness C and Pfannenschmidt S. 1966. *The Impact Of Family Planning And Reproductive Health On Women's Lives: A Conceptual Framework*, Women's Studies Project Working Paper, WP96-02. Research Triangle Park, NC: Family International.

Hidayati Amal SH, Novriaty S, Hardee K, Eggleston E, and Hull T., 1997, *Family Planning And Women's Empowerment: Challenges For The Indonesian Family*, Women's Studies Center, Faculty Of Social And Political Science, University of Indonesia and Research Triangle Park, NC: Family Health Internasional.

Hirut T, 2004, *Violence Against Women In Ethiopia: A Strong Case Of Civil Society Concern*, dalam: Chowdhury S. , Wais A., dan Kahsai Wolde Giorgis (Eds) *Civil Society in Ethiopia: Reflections on Realities and Perspectives of Hope* , African – Asian Studies Promotion Association.

Hull VJ, 1982, Women in java's Rural Middle Class: Progress or Regress? In Van Esterik P. Ed. *Women Of Southeast Asia*, Northern Illinois University, Center for Southeastern Studies.

IPPF, 2012: *Family Planning And Women's Empowerment*, IPPF: European Network.

Kishor S, 2000, *Empowerment Of Women In Egypt And Links To The Survival And Health Of Their Infants*, dalam : Harriet B. and Gita Sen Presser . *Women's Empowerment And Demographic Processes*, New York, Oxford University Press.

Mason KO., 1986, *The Status Of Women: Conceptual And Methodological Issues In Demographic Studies*, Sociological Forum, I(2):284-300.

Mukuria A, Aboulfia C, Themme A., 2005, *The Context Of Women's Health : Result From The Demographic And Health Surveys 1994 – 2001*, Comparative Reports No. 11, Calverton, Maryland: ORC Macro.

Nachrowi & Usman, Hardius, 2008, *Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta.

Oxaal, Zoe dan Baden, Sally, 1997, *Gender And Empowerment: Definitions, Approaches And Implication For Policy*, Brighton: Institute Of Development Studies.

Oxfam, 1995, *The Oxfam Handbook Of Relief And Development*, Oxfam, Oxford.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 , RPJM Tahun 2004 – 2009, Jakarta: 2005.

Stoler A., 1977, Class, Structure, And Female Autonomy In Java, In Wellesley College Center For Research On Women In Higher Education And Profession, *Women And National Development: The Complexities Of Change*, Chicago: University Of Chicago Press ,78-89.

Undang-Undang Perkawinan RI (Indonesian Marriage Law), 1974. Surabaya: Arkola.

UNDP, 1995, Human Development Report 1995, Oxford University Press, Oxford.

UNDP, 2005, Human Development Report (HDR), Ofpord University Press, Oxford.

....., 2006, Human Development Report (HDR), Oxford University Press, Oxford.

....., 2007, Human Development6Report (HDR), Oxford University Press, Oxford.

....., 2008, Human Development Report (HDR), Oxford University Press, Oxford.

LAMPIRAN

1. Jumlah dan Presentase wanita kawin menurut Kesertaan ber KB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tdk Pakai Kontrasepsi (0)	96	11,7	11,7	11,7
id Pakai Kontrasepsi (1)	722	88,3	88,3	100,0
Total	818	100,0	100,0	

2. Jumlah dan Presentase wanita kawin menurut Usia Kawin Pertama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Di bawah 20 Thn (0)	478	58,4	58,4	58,4
20 Thn ke atas (1)	340	41,6	41,6	100,0
Total	818	100,0	100,0	

3. Jumlah dan Presentase wanita kawin menurut Tingkat Pendidikan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD ke bawah	463	56,6	56,6	56,6
SMP	309	37,8	37,8	94,4
SLTA ke atas	46	5,6	5,6	100,0
Total	818	100,0	100,0	

4. Jumlah dan Presentase wanita kawin menurut Status Pekerjaan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Bekerja (0)	361	44,1	44,1	44,1
Bekerja (1)	457	55,9	55,9	100,0
Total	818	100,0	100,0	

5. Jumlah dan Presentase wanita kawin menurut Jumlah Anak Ideal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Lebih dari 3 anak (0)	310	37,9	37,9	37,9
1-2 anak (1)	351	42,9	42,9	80,8
3 anak (2)	157	19,2	19,2	100,0
Total	818	100,0	100,0	

6. Jumlah dan Presentase wanita kawin menurut Kohor Kelahiran Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kelahiran thn 1958-1976 (0)	492	60,1	60,1	60,1
Kelahiran thn 1977-1992 (1)	326	39,9	39,9	100,0
Total	818	100,0	100,0	

7. Pola dan perbedaan terjadinya peningkatan Pemberdayaan Perempuan menurut Kesertaan ber KB, Usia Kawin Pertama, Jumlah Anak Lahir Hidup, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Jumlah Anak Ideal dan Kohor Kelahiran.

- a. Pemberdayaan perempuan (Otonomi) dan Kesertaan ber KB

Kesertaan KB* Otonomi Crosstabulation

		Otonomi		Total	
		Tidak Otonom	Otonom		
Kesertaan_KB	Tidak Pakai Kontrasepsi	Count	4	92	96
		% within Kesertaan_	4,20%	95,80%	100%
		% within Otonomi	44,40%	11,40%	11,70%
	Pakai Kontrasepsi	Count	5	717	722
		% within Kesertaan_	0,70%	99,30%	100,00%
		% within Otonomi	55,60%	88,60%	88,30%
Total		Count	9	809	818
		% within Kesertaan_	1,10%	98,90%	100,00%
		% within Otonomi	100,00%	100,00%	100,00%

Chi-Square Test

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2 sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,399 ^b	1	,002		
Continuity correction ^a	6,477	1	,011		
Likelihood Ratio	6,128	1	,013		
Fisher's Exact Test				,014	,014
Lienar-by-linear Association	9,387	1	,002		
N of Valid Cases	818				

- a. Computed only for 2x2 table

- b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06

b. Pemberdayaan Perempuan (Otonomi) dan Usia Kawin Pertama

UKP* Otonomi Crosstabulation

			Otonomi		Total
			Tidak Otonom	Otonom	
UKP	di bawah 20 tahun	Count	6	472	478
		% within UKP	1,3%	98,7%	100%
		% within Otonomi	66,7%	58,3%	58,4%
	20 tahun ke atas	Count	3	337	340
		% within UKP	,9%	99,1%	100,00%
		% within Otonomi	33,3%	41,7%	41,0%
Total	Count	9	809	818	
	% within UKP	1,10%	98,90%	100,00%	
	% within Otonomi	100,00%	100,00%	100,00%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,254 ^a	1	,614	,742	,443
Continuity correction ^a	,027	1	,870		
Likelihood Ratio	,260	1	,610		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-linear Association					
N of Valid Cases	818		,002		

a. Computed only for 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 3.74.

c. Pemberdayaan perempuan (Otonomi) dan Tingkat Pendidikan Ibu

Pendidikan * Otonomi Crosstabulation

			Otonom		Total
			Tidak Otonom	Otonom	
Pendidikan	Sd ke bawah	Count	4	459	463
		% within Pendidikan	0,90%	99,10%	100,00%
		% within Otonomi	44,40%	56,70%	56,60%
	SMP	Count	3	306	309
		% within Pendidikan	1,00%	99,00%	100,00%
		% within Otonomi	33,30%	37,80%	37,80%
	SMA ke atas	Count	2	44	46
		% within Pendidikan	4,30%	95,70%	100,00%
		% within Otonomi	22,20%	5,40%	5,60%
Total	Count	9	809	818	
	% within Pendidikan	1,10%	98,90%	100%	
	% within Otonomi	100,00%	100,00%	100,00%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4,744 ^a	2	,093
Likelihood Ratio	2,864	2	,239
Linear-by-linear Association	2,074	1	,150
N of Valid Cases	818		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count .51

d. Pemberdayaan perempuan (Otonomi) dan Status Pekerjaan Ibu

Kerja * Otonomi Crosstabulation

			Otonomi		Total
			Tidak Otonom	Otonom	
Kerja	Tidak bekerja	Count	5	356	361
		% within kerja	1,4%	98,6%	100%
		% within Otonomi	55,6%	44,0%	44,1%
	Bekerja	Count	4	453	457
		% within kerja	,9%	99,1%	100,00%
		% within Otonomi	44,4%	56,0%	55,9%
Total	Count	9	809	818	
	% within kerja	1,10%	98,90%	100,00%	
	% within Otonomi	100,00%	100,00%	100,00%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,482 ^b	1	,488		
Continuity correction ^a	,127	1	,721		
Likelihood Ratio	,477	1	,490		
Fisher's Exact Test				,518	,358
Lienar-by-linear Association	,481	1	,488		
N of Valid Cases	818				

a. Computed only for 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 3.97.

e. Pemberdayaan perempuan (Otonomi) dan Jumlah Anak Ideal

JAI * Otonomi Crosstabulation

		Otonomi		Total	
		Tidak Otonom	Otonom		
JAI	Lebih Dari 3 Anak	Count	3	307	310
		% within JAI	1,0%	99,0%	100%
		% within Otonomi	33,3%	37,9%	37,9%
	1 - 2 anak	Count	4	347	351
		% within JAI	1,1%	98,9%	100,00%
		% within Otonomi	44,4%	42,9%	42,9%
	3 Anak	Count	2	155	157
		% within JAI	1,3%	98,7%	100,00%
		% within Otonomi	22,2%	19,2%	19,2%
Total	Count	9	809	818	
	% within kerja	1,1%	98,90%	100,00%	
	% within Otonomi	100,00%	100,00%	100,00%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,099 ^a	2	,952
Likelihood Rasi	,98	2	,952
Lienar-by-linear Association	,098	1	,755
N of Valid Cases	818		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 1.73.

f. Pemberdayaan Perempuan (Otonomi) Dan Kohor Kelahiran

Kohor * Otonomi Crosstabulation

		Otonomi		Total	
		Tidak Otonom	Otonom		
Kohor	Kelahiran Tahun 1958 -1976	Count	5	487	492
		% within kohor	10%	99,0%	100%
		% within Otonomi	55,6%	60,2%	60,1%
	Kelahiran Tahun 1977 - 1982	Count	4	322	326
		% within kerja	1,2%	98,8%	100,00%
		% within Otonomi	44,4%	39,8%	39,9%
Total	Count	9	809	818	
	% within kerja	1,1%	98,9%	100,00%	
	% within Otonomi	100,0%	100,0%	100,00%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,080 ^b	1	,777		
Continuity correction ^a	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,079	1	,778		
Fisher's Exact Test				,747	,514
Lienar-by-linear Association	,080	1	,777		
N of Valid Cases	818				

a. Computed only for 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.59.

8. Hasil Crosstab Tingkat Pendidikan, Kesertaan Ber KB Dengan Otonomi

Pendidikan * Otonomi* Crosstabulation

Kesertaan KB			Otonom		Total	
			Tidak Otonom	Otonom		
Pendidikan	SD ke bawah	Count	2	64	66	
		% within Pendidikan	3,07%	97,0%	100%	
		% within Otonomi	50,0%	69,6%	68,8%	
	SMP	Count	2	27	29	
		% within Pendidikan	6,9%	97,3%	200%	
		% within Otonomi	50,0%	29,3%	30,2%	
Tidak Pakai Kontrasepsi	SMA ke atas	Count	0	1	1	
		% within Pendidikan	,0%	100%	100%	
		% within Otonomi	.0%	1,1%	1,0%	
	Total	Count	2	94	96	
		% within Pendidikan	4,2%	95,8%	100,0%	
		% within Otonomi	100%	100%	100%	
Pendidikan	SD ke bawah	Count	2	395	397	
		% within Pendidikan	5%	99,5%	100%	
		% within Otonomi	40,0%	55,1%	55,0%	
	SMP	Count	1	279	280	
		% within Pendidikan	,4%	99,6%	100%	
		% within Otonomi	20,0%	38,9%	38,8%	
	Pakai Kontrasepsi	SMA ke atas	Count	2	43	45
			% within Pendidikan	4,4%	95,6%	100%
			% within Otonomi	40,0%	6,9%	6,2%
Total		Count	5	717	722	
		% within Pendidikan	,7%	99,3%	100%	
		% within Otonomi	100%	100%	100%	

Chi-Square Tests

Kesertaan KB		Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Tidak pakai kontrasepsi	Pearson Chi-Square	.789 ^a	2	.671
	Likelihood Ratio	.775	2	.679
	Linear-by-linear Association	.541	1	.462
	N of Valid Cases	96		
	Pakai kontrasepsi	Pearson Chi-Square	9,875 ^b	2
Likelihood Ratio		4,908	2	.086
Linear-by-linear Association		3,191	1	.074
N of Valid Cases		722		

- a. 4 cells (66,7.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04
- b. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .31.

9. Hasil Regresi Biner

Dependent Variabel Encoding

Original value	Internal value
Tidak Otonom	0
Otonom	1

Categorical Variabels Coding

		Frequency	Parameter Coding	
			(1)	(2)
Pendidikan	SD ke bawah	463	.000	.000
	SMP	309	1.000	.000
	SMA ke atas	46	.000	1.000
JAI	Lebih dari 3 anak	310	.000	.000
	1 – 2 anak	351	1.000	.000
	3 anak	157	.000	1.000
Kohor	Kelahiran Thn 1958-1976	492	.000	

UKP	Kelahiran Thn 1977-1902 di bawah 20 tahun	326	1.000
	20 tahun ke atas	478	.000
Kerja	Tidak bekerja	340	1.000
	Bekerja	457	1.000
Kesertaan KB	Tidak pakai kontrasepsi	96	.000
	Pakai kontrasepsi	722	1.000

Block 1 : Method = Enter

Omnibus Tests Of Model Coeffisients

		Chi - square	df	Sig
Step 1	Step	13.076	8	.109
	Block	13.076	8	.109
	Model	13.076	8	.109

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	85.998 ^a	.016	.139

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter aetimates changed by less than .001.

Variabel In The Equation

		B	SE	Wald	df	Sig	Exp(B)
Step 1	Kesertaan KB (1)	2.223	.742	8.978	1	.003	9.232
	UKP (1)	1.102	.889	1.539	1	.215	3.011
	Status Kerja (1)	.652	.716	.831	1	.362	1.920
	JAI			.169	2	.919	
	JAI (1)	-.176	.850	.043	1	.836	.839
	JAI (2)	-.401	.076	.169	1	.681	.670
	Didik3			7.201	2	.027	
	Didik3(1)	-.410	.835	.241	1	.624	.664
	Didik3(2)	-2.965	1.142	6.738	1	.009	.052
	Kohor kelahiran(1)	.043	.753	.003	1	.935	1.943
	Constant	2.806	.831	11.396	1	.001	16.540

a. Variabel(s) entered on step 1: Kesertaan KB, UKP, Status Kerja, JAI, didik3, Kohor Kelahiran.